

**STRATEGI PENGUATAN LPHD DALAM MENDUKUNG
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS
DI DESA TELAGA, KECAMATAN KAMIPANG,
KABUPATEN KATINGAN**

SADDAM RAMADHANI



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN
2026**

ABSTRAK

Skema Hutan Desa merupakan salah satu pilar Perhutanan Sosial yang bertujuan menekan laju deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Di tingkat tapak, keberhasilan mandat ini bertumpu pada kapasitas kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). LPHD Desa Telaga memegang hak kelola atas kawasan Hutan Production Terbatas (HPT) seluas $\pm$ 2.758 hektar di ekosistem rawa gambut Kabupaten Katingan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh masalah hulu ke hilir seperti keterbatasan manajerial dan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan LPHD Desa Telaga. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari hingga Mei 2026 di Desa Telaga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipertegas dengan analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, kuesioner terstruktur skala Likert, dan studi dokumentasi dengan teknik purposive sampling yang melibatkan pengurus LPHD, pemerintah desa, tokoh adat, pendamping KPH/NGO, dan masyarakat setempat. Hasil analisis matriks IFAS dan EFAS menunjukkan nilai koordinat sumbu X sebesar 0,017 (internal positif) dan sumbu Y sebesar 0,0. Posisi ini menempatkan kelembagaan LPHD Desa Telaga berada tepat pada garis tengah horizontal (titik ekuilibrium) yang merekomendasikan Strategi Stabilitas dan Konsolidasi Internal. Organisasi memiliki kekuatan potensial berupa legalitas hukum formal yang sah (SK Kementerian LHK dan SK Kepala Desa) serta modal sosial swadaya fisik masyarakat yang solid. Namun, secara eksternal posisinya berimbang antara peluang kemitraan dengan KPH/NGO dan ancaman kerentanan hukum tata laksana lokal akibat belum adanya regulasi tingkat desa. Strategi penguatan dilakukan melalui perumusan kombinasi matriks SWOT yang dikelompokkan ke dalam urutan langkah prioritas strategis yang sekuensial (berurutan) meliputi: (1) Percepatan penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa (Perdes) khusus Pengelolaan Hutan Desa, (2) Penguatan kapasitas SDM pengurus melalui pelatihan literasi keuangan, (3) Pembenahan tata kelola administrasi ke arah digitalisasi pembukuan kas, (4) Perluasan jaringan kemitraan eksternal, dan (5) Optimalisasi partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan/rapat koordinasi LPHD di tingkat tapak.

Kata kunci: *Analisis SWOT, hutan desa, kapasitas organisasi, LPHD Desa Telaga, stabilitas.*

ABSTRACT

The Village Forest scheme is one of the pillars of Social Forestry aimed at reducing deforestation rates while improving the welfare of communities around the forest. At the site level, the success of this mandate relies on the institutional capacity of the Village Forest Management Organization (LPHD). LPHD Desa Telaga holds management rights over a Limited Production Forest (HPT) area of 2,758 hectares in the peat swamp ecosystem of Katingan Regency. However, its effectiveness is still hindered by upstream-to-downstream issues such as managerial and funding limitations. This study aims to identify internal and external factors and formulate strategies to strengthen the institutional capacity of LPHD Desa Telaga. The research was conducted from January to May 2026 in Telaga Village using a qualitative descriptive approach strengthened by SWOT analysis. Data collection was carried out through in-depth interviews, field observations, Likert-scale structured questionnaires, and documentation studies using a purposive sampling technique involving LPHD management, village government, customary leaders, KPH/NGO assistants, and local communities. The results of the IFAS and EFAS matrix analysis showed an X-axis coordinate value of 0.017 (positive internal) and a Y-axis value of 0.0. This position places the LPHD Desa Telaga institution exactly on the horizontal centerline (equilibrium point), which recommends a Stability and Internal Consolidation Strategy. The organization possesses potential strengths in the form of formal legal legality (Decree of the Ministry of Environment and Forestry and Decree of the Village Head) as well as solid community physical self-help social capital. However, externally, its position is balanced between partnership opportunities with KPH/NGOs and the threat of local administrative legal vulnerability due to the absence of village-level regulations. The strengthening strategy is implemented through the formulation of a SWOT matrix combination grouped into a sequential order of strategic priority steps, including: (1) Accelerating the drafting and endorsement of special Village Regulations (Perdes) on Village Forest Management, (2) Strengthening the human resource capacity of management through financial literacy training, (3) Reforming administrative governance towards digitalized cash bookkeeping, (4) Expanding external partnership networks, and (5) Optimizing active citizen participation in decision-making/LPHD coordination meetings at the site level.

Keywords: capacity organization, LPHD Desa Telaga, stability, SWOT analysis, village forest.

**STRATEGI PENGUATAN LPHD DALAM MENDUKUNG
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DI DESA
TELAGA, KECAMATAN KAMIPANG, KABUPATEN KATINGAN**

SADDAM RAMADHANI

NIM. 22.61.026016

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada
Program Studi Kehutanan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallah Wa Ta'ala* segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari 2026 sampai dengan Juni 2026, dengan judul Strategi Penguatan LPHD Untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Studi Kasus LPHD Desa Telaga Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang penulis sayangi, terima kasih atas doa dan seluruh usaha dalam setiap proses kehidupan penulis.
2. Keluarga besar penulis yang menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan.
3. Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi khususnya untuk program KIP Kuliah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
4. Ibu Dr. Ise Afitah, S.Hut., M.P selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nanang Hanafi, S.Hut., M.P. selaku Dekan Fapertahut sekaligus dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan tenaga bersama dosen pembimbing pertama telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Beni Iskandar, S.Hut., M.Si. selaku ketua program studi Kehutanan atas dedikasi dan arahannya selama penulis berkuliah.
7. Bapak Ardiyansyah Purnama, S.Hut., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Kepala dan Perangkat Desa Telaga Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan.

9. Ketua LPHD dan Jajaran Desa Telaga Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan
10. Teman-teman satu seperjuangan, angkatan 2022 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UMPR.
11. Seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya di skripsi ini, terima kasih sudah menemani semua proses dalam penulisan skripsi penulis. Bahkan rela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada penulis sendiri, semoga ini adalah awal dari proses belajar panjang yang akan terus terjadi dalam siklus kehidupan.
Semoga skripsi ini bermanfaat.

Palangka Raya, 18 Juni 2026

Saddam Ramadhani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konsep Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Perhutanan Sosial	5
2.3 Kapasitas Manajerial Pengurus LPHD	8
2.4 Penelitian Terdahulu.....	9
2.5 Kerangka Berpikir	12
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	15
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	15
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	16
3.4 Pengumpulan Data.....	18
3.5 Analisis Data	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	24
4.3 Kondisi Kelembagaan LPHD Desa Telaga.....	30

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat	32
4.5 Tabel IFAS dan EFAS	34
4.6 Analisis SWOT	38
4.7 Prioritas Strategis	47
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu	10
Tabel 3. 1 Kriteria Informan.....	18
Tabel 3. 2 Indikator Penelitian	19
Tabel 3. 3 Matrik IFAS dan EFAS	21
Tabel 4. 2 Hasil Observasi	30
Tabel 4. 3 Faktor Pendukung	32
Tabel 4. 4 Faktor Penghambat.....	33
Tabel 4. 5 IFAS dan EFAS.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	14
Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian.....	16
Gambar 3. 2 Kebijakan Strategi dalam Kuadran SWOT	22
Gambar 4. 1 Peta Desa Telaga	26
Gambar 4. 2 Diagram Kuadran SWOT LPHD Desa Telaga.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	54
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sebagai ekosistem yang krusial bagi keseimbangan ekologi dan ekonomi, hutan di Kalimantan Tengah punya peran besar dengan total luas mencapai 10,152 juta hektar (Sukarna et al., 2022). Dari jutaan hektar tersebut, sebagian besarnya merupakan hutan lindung dan produksi yang butuh pengawasan ketat agar fungsinya sebagai pengendali tata air dan pelindung lingkungan tetap terjaga (Sembiring et al., 2026). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Republik Indonesia, 2021) tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial tentang hutan desa menyebutkan bahwa hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/persetujuan pemanfaatan.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Hutan Desa telah menjadi strategi yang diterapkan pemerintah untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Yuliasih & Sihalohe, 2018). Hutan Desa merupakan salah satu dari 5 skema Perhutanan Sosial yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melibatkan masyarakat untuk menekan laju deforestasi (Januar et al., 2020).

Dalam struktur sosial, sebuah lembaga adalah seperangkat hubungan normatif yang berisi keyakinan dan nilai yang terpusat pada kebutuhan sosial yang menjadi pendorong timbulnya tindakan yang menjadi tradisi sosial (Zainuddin & Siti Nurhidayatul Hasanah, 2022). Sedangkan kelembagaan adalah diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam Masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidak pastina dalam mengontrol (Porajow et al., 2021)

Dalam pengelolaan hutan desa, ada sebuah istilah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). LPHD adalah merupakan media untuk masyarakat menjalankan sistem pengelolaan hutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan yang dikelola (Apriandana et al., 2021). Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), yang berfungsi untuk mengoordinasikan aktivitas masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui berbagai program, seperti pengelolaan rotan, penanaman pohon, dan pengembangan ekowisata (Extrada, 2025). Selain itu, LPHD melaksanakan fungsi konservasi, pengelolaan, pemantauan, dan restorasi hutan guna memastikan keberlanjutan ekosistem di wilayah desa (Sofiana et al., 2025)

LPHD berfungsi sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab menyusun rencana kerja, melakukan perlindungan hutan dari ancaman kebakaran dan pembalakan liar, serta mengelola potensi ekonomi desa (Fatiqin, 2024). Selain itu, LPHD juga berperan sebagai peran LPHD dalam mencapai tigabdimensi kesejahteraan, seperti ekonomi yang berkelanjutan, sosial yang inklusif, dan lingkungan yang berkelanjutan (Yuliasih & Sihalo, 2018).

Keberhasilan program Hutan Desa di Katingan akan memiliki dampak signifikan, baik pada mitigasi perubahan iklim (khususnya melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan/karhutla) maupun pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Dayak setempat. Namun, efektivitas LPHD sering kali terbentur pada realitas kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Di Desa Telaga, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, LPHD Telaga mengelola kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 2.758 hektar berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 1228/2018. Meskipun telah membentuk 24 anggota dan 2 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), LPHD Telaga masih menghadapi tantangan hulu ke hilir—mulai dari keterbatasan pendanaan, kendala manajerial internal, hingga kerentanan eksternal terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut yang sensitif.

Tantangan nyata yang dihadapi berakar dari lemahnya sosialisasi aturan main (rules of the game) organisasi ke tingkat tapak, pembagian peran di internal

kepengurusan yang belum berjalan optimal, serta minimnya sinergi perencanaan anggaran dengan pemerintah desa. Hambatan tata kelola ini menyebabkan LPHD Telaga mengalami stagnasi kapasitas, sehingga kesulitan dalam mengeksekusi rencana kerja kerja tahunan secara mandiri. Tanpa adanya penguatan manajemen internal, fungsi perlindungan hutan gambut Katingan yang sangat sensitif terhadap karhutla terancam tidak berjalan efektif, dan keberadaan KUPS yang telah dibentuk pun terancam pasif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kapasitas manajerial LPHD Desa Telaga serta merumuskan strategi penguatan tata kelola internal organisasi. Melalui perumusan strategi manajerial ini, LPHD Telaga diharapkan mampu bertransformasi menjadi lembaga yang mandiri, tertib administratif, dan responsif dalam mengeksekusi agenda pengelolaan hutan berkelanjutan di Desa Telaga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi tata kelola kelembagaan LPHD Desa Telaga?
2. Bagaimana Strategi Penguatan yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan LPHD Desa Telaga, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penguatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Desa Telaga.
2. Menganalisis strategi penguatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Desa Telaga

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan pembelajaran di atas manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai manajemen dan tata kelola kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara khusus, penelitian ini berkontribusi dalam memetakan bagaimana LPHD membangun sinergi manajerial, menyelaraskan perencanaan program, serta mengoordinasikan penganggaran dengan Pemerintah Desa dalam kerangka kebijakan perhutanan sosial. Melalui fokus tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang aplikatif bagi pengembangan bidang ilmu tata kelola dan penguatan kapasitas organisasi lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Telaga

Memberikan panduan strategis penguatan tata kelola internal agar pengurus LPHD mampu menjalankan roda organisasi secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan, serta tidak terjebak pada pemenuhan indikator program yang bersifat temporer.

b. Bagi Pemerintah Desa Telaga

Memberikan rekomendasi solusi manajerial untuk menyelaraskan batas wewenang pengelolaan lahan, guna meminimalkan tumpang tindih regulasi serta membangun tata kelola kemitraan yang sehat dan integratif antara Pemerintah Desa dan LPHD.

c. Bagi Masyarakat Desa Telaga

Memberikan rekomendasi manajerial dalam penyusunan rencana kerja usaha yang rasional, sehingga LPHD mampu mengelola potensi ekonomi hutan secara mandiri, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip dasar Perhutanan Sosial.